

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PERANNYA DALAM MENUMBUHKAN HABITUS WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Sakti Ritonga, Syarbaini Saleh & Ramanda Zidane

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371, Indonesia
e-mail: aktiritonga@uinsu.ac.id; syarbainisaleh@uinsu.ac.id;
ramandhazidane@gmail.com

Abstrak: Indonesia dan Malaysia merupakan negara multietnik dan multikultural yang menghadapi tantangan utama dalam pembentukan karakter nasional dan integrasi sosial warganegara. Kedua negara mengembangkan konsep pendidikan kewarganegaraan untuk menyatukan keragaman serta mendorong sistem demokrasi. Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumen kurikulum, dan studi kepustakaan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber serta teknik, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi pendidikan kewarganegaraan di kedua negara memiliki perbedaan sesuai dinamika dan sejarah masing-masing. Meski demikian, praktik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia sama-sama diarahkan untuk membentuk identitas bersama, menumbuhkan nasionalisme, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Habitus demokrasi yang terus berkembang menjadi indikator penting kualitas penyelenggaraan negara dan budaya kewarganegaraan yang maju.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Habitus, Budaya, Demokrasi, Indonesia, Malaysia

A. Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang di satu sisi memiliki kesamaan dalam latar kemajemukan suku bangsa atau multi etnik, agama dan kebudayaan. Persoalan utama kedua negara dengan latar belakang nation state termasuk Indonesia dan Malaysia adalah pembentukan karakter bersama warganegaraanya. Mayoritas Negara dengan karakter multi entitas menghadapi persoalan pembentukan *nation*. Fakta ini mendorong kedua negara mengembangkan konsep pendidikan kewarganegaraan dengan fokus utama pada penyatuan integrasi sosial warganegara dan mendorong sistem demokrasi. Malaysia mengembangkan dalam pendidikan nasional mereka dengan nama Pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Indonesia mengembangkan pendidikan Kewarganegaraan. Materi diajarkan dari sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dapat difungsikan sebagai pendidikan demokrasi.

Penelusuran peneliti terhadap isu penelitian memperlihatkan relatif memadai dan cukup menarik minat kalangan akademisi di Indonesia maupun Malaysia. Bahan-bahan dokumen seperti hasil studi, jurnal, dokumen resmi cukup memadai dan ini menjadi bahan rujukan utama studi ini. Beberapa studi terkini berhasil dan menyajikan aspek perbandingan sejarah perkembangan dan isu kajian pendidikan kewarganegaraan dari mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hasil studi perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan seperti tampak pada studi Widiatmaka (2022;2023); Hendra dan Hajri (2023).

Pendidikan demokrasi yang didesain dan dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana dikemukakan Zaromi (*dalam* Ubedillah dkk, 2009:7) bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokrasi, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat, demokrasi merupakan proses pembelajaran yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Pada tataran konseptual

demikian, perkembangan dan kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Studi ini melihat bagaimana perkembangan pendidikan kewarganegaraan mengintrodusir nilai-nilai dasar pendidikan kewarganegaraan pada kedua negara. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan berperan mengembangkan habitus warga negara yang demokratis pada kedua negara. Studi tentang karakter demokratis memakai kerangka teori Habitus dari Pierre Bordinue.

Habitus dan karakter warga negara yang demokratis menurut Rosyada (2003:81;82) menggambarkan sikap dan sifat warga Negara yang otonom, mampu mempengaruhi dan menunjukkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam konteks yang dihadapinya secara mandiri. Habitus warga negara yang demokratis serta mandiri tersebut diperlihatkan melalui sejumlah karakter yaitu: memiliki kemandirian, memiliki tanggungjawab sebagai warga negara, menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi, berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan cara yang santun, mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Hendra dan Hajri (2023) menemukan bahwa Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk memberikan pemahaman kebangsaan, hak, dan kewajiban warga negara serta sebagai media pendidikan karakter kepada masyarakat. Implementasi pendidikan kewarganegaraan tiap-tiap negara berbeda-beda sesuai dinamika dan sejarah yang menyertainya.

Habitus menurut Bourdieu merupakan seperangkat instrumen bagi manusia melangsungkan kehidupan sosialnya yaitu berupa struktur pengetahuan yang diinternalisasi melalui proses rentang masa waktu relatif panjang oleh struktur atau hasil ciptaan kehidupan kolektif. Karena struktur pengetahuan manusia bersifat dinamis, maka secara terus menerus manusia menghasilkan tindakan dalam rangka merespons struktur sosial yang dihadapinya (Ritzer, 2014:478). Tindakan aktor menurut Bourdieu, baik individu maupun kelompok, selain dipengaruhi oleh habitusnya, tetapi juga dipengaruhi struktur sosial di sekitarnya yang terus berdinamika sesuai dengan perkembangan yang terus ganti

berganti. (Bourdieu, 1977). Ranah sosial bersifat relasional alih-alih struktural. Karenanya, ranah sosial harus dilihat dalam kaitan dengan Politik/kekuasaan, Struktur hubungan antar kedudukan para agen tergantung penguasaan modal di dalam ranah tersebut (Bourdieu, 2016). Menurut Bourdieu (Riawanti, 2017:31-32) bahwa struktur yang membentuk suatu lingkungan tertentu seperti kehidupan materi yang khas bagi suatu komunitas, menghasilkan sistem habitus yang relatif tetap, sebagai prinsip penciptaan dan pengaturan praktik dan gagasan yang dapat diatur serta teratur meskipun tidak selalu mengikuti aturan. Praktik yang dihasilkan habitus memungkinkan agen menghadapi situasi tidak terduga dan senantiasa berubah.

Habitus dan karakter warga negara yang demokratis yang mesti ditumbuhkembangkan dalam proses mendorong demokratisasi Indonesia (Cholisin, 2013:92). Secara berkelanjutan dan berkesinambungan pendidikan demokrasi yang ditumbuhkembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan diproyeksikan akan dapat mengkonstruksi *civic virtues* (Kalidjernih, 2010:21). Menurut Sunarso (2009) bahwa perkembangan kewarganegaraan tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik penguasa. Hal tersebut tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan zaman sehingga tuntutan dalam pendidikan kewarganegaraan selalu dinamis tanpa menghilangkan makna esensi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Mengacu pendapat Winataputra (2014) konsep Pendidikan Kewarganegaraan secara holistik bertujuan supaya semua generasi muda memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma UUD 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika serta komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Pandangan ini senada dengan pemikiran Maftuh dan Sapriya (2005) yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia supaya setiap warganegara berkembang menjadi warga negara yang baik. Warganegara yang baik dicirikan dengan sejumlah kualitas di antaranya: cerdas secara intelektual, emosional, sosial dan spritual, memiliki kebanggaan dan bertanggungjawab serta

berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Winarno dan Wijianto (2010) menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dikembangkan pada peserta didik kaitannya dengan refleksi warga negara yang baik.

B. Metode Penelitian

Studi ini dilakukan dengan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih tepat didasarkan pada asumsi bahwa nilai-nilai dan konsepsi merupakan landasan hubungan antarsesama manusia atau fenomena sosial yang berlangsung. Temuan jawaban masalah penelitian ini dengan demikian difokuskan pada unsur-unsur yang bersifat struktur kognitif dan konseptual. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ditetapkan untuk memahami pemaknaan yang berkaitan nilai-nilai dan konsepsi subjek penelitian. Selain itu metode kualitatif juga untuk memahami fenomena yang berkembang pada konteks studi ini dilakukan. Metode ini dipilih dengan pertimbangan untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian berdasarkan sudut pandang dan pemaknaan (*verstehen*) atas fenomena yang berlangsung pada latar sosialnya (*natural setting*) (Moleong, 2021).

Data penelitian yang dibutuhkan diklasifikasi ke dalam dua tema, *Pertama*, perkembangan dan dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. *Kedua*, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia berperan mengembangkan habitus warganegara yang demokratis. Terkait dengan konteks perkembangan dan dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia, data yang diperlukan seperti, sejarah perkembangan, konsep, nilai dasar, kurikulum, pendidikan kewarganegaraan dan hubungannya dengan pendidikan demokrasi. Tema data ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman konteks Pendidikan Kewarganegaraan pada kedua negara. Tema kedua terkait dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan habitus warganegara yang demokratis. Meskipun harus terbuka diakui

bahwa proses pengumpulan data sangat terbatas dengan informan dan waktu yang singkat, proses pengumpulan data di lapangan dilakukan tetap dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi berperan serta (*participant observation*) dan teknik dokumentasi. *Pertama*, Wawancara mendalam (*indepth interview*) dalam studi ini sebagai salah satu teknik pengumpulan data kualitatif. Wawancara diarahkan pada penggalian data yang berkaitan dengan konsepsi, ide, pandangan dan penilaian terhadap fenomena sosial yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan wawancara mendalam dilakukan dengan Prof. Madya Dr. Nizam Mohd. Sahad dari Universiti Sains Malaysia dan Dr. Warjio, M.A., Universitas Sumatera Utara (USU). *Kedua*, Observasi dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu. Observasi dalam penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung ke tempat lokasi penelitian untuk memperoleh data dengan informasi secara faktual. Pengamatan terbatas hanya sempat dilakukan di Indonesia. *Ketiga*, Dokumentasi. Selain wawancara dalam waktu yang singkat sebagian besar data penelitian ini memanfaatkan bahan kepustakaan dan dokumentasi berupa hasil-hasil studi, jurnal, website serta sumber online lainnya dengan memperhatikan konten yang relevan dengan isu studi ini dengan berfokus pada pengalaman praktis pada kedua latar penelitian.

Peneliti lebih banyak memanfaatkan dokumen seperti hasil studi, laporan penelitian, jurnal, makalah atau bahan ajar dan kurikulum pendidikan. Teknik analisis data bahan-bahan dokumen mengikuti analisis isi atau analisis konten melalui tahapan yaitu: penyatuan data, memilah data, menelaah setiap data yang diperoleh, melakukan penyederhanaan data, menarik kesimpulan, untuk selanjutnya membuat narasi. Informan penelitian adalah akademisi, dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang memahami isu utama terkait dengan isu penelitian ini yaitu pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. Penetapan informan penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa informan

benar-benar memahami dan mendalami isu yang diteliti. Karena keterbatasan akses kepada informan terutama Malaysia maka penelitian ini lebih banyak bersandar pada bahan-bahan tertulis, hasil kajian atau dokumen resmi yang dihasilkan peneliti lain atau dibuat sendiri oleh informan rujukan. Peneliti sendiri hanya memiliki waktu dan kesempatan singkat melakukan wawancara dengan Prof. Madya Dr. Nizam Mohd. Sahad ketika berkunjung ke bagian Pusat Pengkajian Ilmu Kemanusiaan di Universiti Sains Malaysia (USM) di Pula Penang tanggal 26 September 2024 yang lalu. Wawancara singkat dalam rangka mempertajam pemahaman dan hasil-hasil temuan studi yang sesungguhnya telah dilakukan seminar hasil penelitian. Peneliti banyak terbantu dengan sumber-sumber informasi penting di Indonesia dengan beberapa dosen Pendidikan Kewarganegaraan di kampus UIN Sumatera Utara (UIN SU) tentunya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pendalaman pemahaman pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Dr. Warjio, M.A., dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU). Sebagai informan yang menimba ilmu di Malaysia dan studi-studi penting yang dilakukannya terkait isu politik dan demokrasi.

Teknik analisis data mengikuti teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984). Tahapannya dimulai dari sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, reduksi data. Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara hasil data serta observasi dicatat secara terperinci dan memfokuskan pada hal yang penting dengan demikian data yang didapat bisa memberikan gambaran yang jelas. *Kedua*, penyajian data. Setelah direduksi peneliti melakukan penyajian dalam bentuk tabel frekuensi dan teks bersifat naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang terkumpul yang dapat dijabarkan secara naratif dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Jika hasil kesimpulan belum bisa menjawab rumusan masalah penelitian, maka kegiatan analisis data akan kembali diulang mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Winarno dan Wijianto (2010) Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang harus dikembangkan pada peserta didik kaitannya dengan refleksi warga negara yang baik. Melalui sejarah yang panjang pendidikan kewarganegaraan di sudah berkembang sejak pemerintahan Hindia Belanda kepatuhan dan pengenalan hak/ kewajiban terhadap Hindia Belanda. Jepang menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap Jepang Jepang dengan tujuan menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap Jepang (Hendra dan Hajri, 2023:45).

Pasca kemerdekaan pendidikan kewarganegaraan mulai dikembangkan. Sejak tahun 1957 Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan bersamaan dengan mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Model dan arah pengembangannya terus berjalan seiring dengan perubahan arah politik Negara. Pengaruh dinamika ini sangat tampak ketika pada awal perkembangannya setelah tahun 1945 pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dengan sistem indoktrinasi. Model dan arah pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang demikian terus berlanjut setidaknya hingga gelombang reformasi tahun 1998 melanda Indonesia. Prana pendidikan juga mengalami perubahan penitng kaitannya dengan konteks pendidikan kewarganegaraan.

Memasuki era reformasi pendidikan kewarganegaraan berkembang dengan paradigma baru yang sangat kompleks. Perubahan arah ini dapat dilihat pada tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional UU No. 20 Tahun 2003 di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan kewarganegaraan dengan arah baru ini menjadi wajib disemua jenjang pendidikan sebagai strategi mendorong warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Pemerintahan dan sistem demokrasi mensyaratkan warga Negara yang memiliki kecakapan dan kompetensi dalam tiga hal yaitu karakter kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Tiga kecakapan dan kompetensi ini dalam rangka mengembangkan warga Negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah era reformasi pendidikan kewarganegaraan berkembang dengan sistem terbuka dan menghindari strategi indoktrinasi.

Melalui Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan mengalami penguatan secara metodologi, dimana penekanannya diarahkan tidak hanya dalam aspek afektif dan kognitif, namun juga mengembangkan aspek psikomotor. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum 2013 menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Posisi PPKn makin disempurnakan dengan adanya Kurikulum 2020 melalui Merdeka Belajar. Kurikulum yang di gagas oleh Mendikbud ini memiliki tiga gagasan utama, yakni: 1) teknologi untuk akselerasi, 2) keberagaman sebagai esensi, dan 3) profil pelajar Pancasila Internalisasi nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal diinternalisasikan dalam pembelajaran untuk menghasilkan pelajar Pancasila yang mempunyai profil bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global dan berakhlak mulia.

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia. Jika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dekat dengan sejarah kolonial Hindia Belanda maka sejarah pendidikan di Malaysia berkaitan erat dengan Inggris. Inggris menerapkan pendidikan dengan sistem pembagian kelompok sosial sebagai strategi menguatkan semangat kedaerahan rakyat Malaysia yang majemuk dari kesukuan dan kebangsaan. Strategi ini bertujuan tidak menimbulkan semangat nasionalisme Malaysia.

Pendidikan diarahkan untuk keperluan tenaga kerja Inggris. Tetapi dalam perkembangannya, untuk mengakomodir keberagaman, akhirnya pemerintah kolonial Inggris membentuk dasar pendidikan kebangsaan dengan memasukkan berbagai etnis.

Setelah kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957, agama resmi Malaysia yakni Islam. Pendidikan moral yang awalnya berupa pengajaran kitab berubah menjadi pengajaran Islam yang diberikan kepada murid beragama Islam. Pendidikan kewarganegaraan Malaysia ditetapkan pada tahun 1972 dengan nama Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Tujuan pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dalam kerangka menanamkan semangat cinta negara. Tahun 1988, dalam rangka memperkuat persatuan bangsa melalui pendidikan, pemerintah Malaysia menetapkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang tercantum dalam Akta Pendidikan 1996 di mana pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. Nilai-nilai yang ada dalam FPK ini merupakan kebutuhan Malaysia dalam upaya persatuan ras, stabilitas politik, kemajuan ekonomi dan sosial serta pembangunan manusia. Sejalan dengan pengaruh perkembangan globalisasi yang semakin pesat, kurikulum pendidikan sivik kewarganegaraan di Malaysia banyak mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya perubahan kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dipengaruhi oleh ketegangan dan perselisihan dalam masyarakat tertentu karena keberagaman budaya, sejarah, agama, dan tradisi (Shufiyati, 2017).

Untuk merespons hal ini, subjek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan atau PSK diperkenalkan kembali pada tahun 2005. Penerapannya dilakukan

secara bertahap mulai Kelas 4 Sekolah Dasar dan Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama. Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Malaysia bermuatan nilai-nilai nasionalisme dan multikulturalisme. Kurikulum ini melingkupi berbagai hal seperti perkembangan individu dan sosial, tanggung jawab sebagai individu terhadap keluarga, partisipasi masyarakat, membangun hubungan yang baik, pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman, penghormatan terhadap hak orang lain, kontribusi terhadap pembangunan nasional serta nilai-nilai kemandirian dan harga diri.

Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan juga berisikan muatan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang melek politik dan melek hukum. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan di Malaysia juga diarahkan agar generasi muda, dalam hal ini siswa untuk memahami dan memiliki civic knowledge, civic skill, dan civic values (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002).

Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia pun selanjutnya ditujukan untuk memberikan partisipasi yang tinggi, ruang sosial yang tinggi, dan pembentukan identitas bersama sebagai bangsa Melayu Malaysia. Pengembangan pendidikan Sivik sejak awal dalam rangka memajukan bangsa Melayu yang dipandang terbelakang dan tertinggal dengan kelompok sosial yang ada terutama Cina. Sebagaimana berdasarkan pemaparan Muhammad Nazreen pada laman <https://www.slideshare.net/slideshow/domain-pendidikan-sivik-dan-kewarganegaraan/6991527#5> Domain pendidikan sivik dan kewarganegaraan bahwa Pendidikan sivik dan kewarganegaraan adalah salah satu teras utama untuk mendidik masyarakat untuk mengetahui peranan-peranan mereka. Pendidikan sivik dapat memastikan masyarakat untuk peka dan aktif di dalam proses perjalanan kenegaraan yang melibatkan keputusan melaksanakan dasar di peringkat kebangsaan, negeri mahupun tempatan. Dengan itu, pendidikan sivik dan kewarganegaraan memberikan panduan kepada mereka untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukan bangsa *nation building*.

B. Pendidikan Kewarganegaraan dan Habitus Demokratis Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana

Pendidikan Demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi yang dikemas di dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokrasi, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat, demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain, kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi (Rozak 2005). Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan Winataputra (2012) Pendidikan demokrasi yang dikemas melalui Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi antara lain: Pertama, Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktik dalam berbagai konteks kehidupan sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai. Kedua, Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian koseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya.

Ketiga, Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih serta, memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Pendidikan demokrasi diharapkan mampu membentuk *civic virtues* generasi muda di Indonesia. *Civic virtues* merupakan istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang

merujuk kepada watak atau karakter (*disposition*) dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan yang demokratis (Kalidjernih 2010).

Habitus Demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Habitus Generasi muda merupakan salah satu kunci kemajuan negara di masa depan, maka sebagaimana dikemukakan Cholisin (2013) generasi muda di Indonesia harus memiliki karakter demokratis apabila ingin mencapai tujuan nasional yang termaktub di dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Habitus dan kepribadian yang memiliki karakter demokratis yang ditanamkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan terutama, yaitu:

Pertama, Toleran dan tanggungjawab terhadap sesama komponen warga negara. Habitus dan karakter ini sebagaimana menurut Rosyada (2003:79-80) tercermin pada kontek negara dengan latarbelakang pluralism etnik, suku bangsa serta agama dan kepercayaan serta ideologi politik. Tidak hanya penghormatan atas fakta kemajemukan tetapi tercermin pada habitus yang menjaga keharmonisan relasi sosial serta ketertiban.

Kedua, Terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru. Sebagaimana dikemukakan Rosyada (2003:79-80) sikap terbuka dan dialogis merupakan habitus warga negara yang demokratis secara konseptual digambarkan adalah pribadi yang terbuka atas perbedaan pandangan, terutama konteks masyarakat plural. Sikap terbuka bersamaan dengan kesediaan membuka ruang diskusi dan dialog. Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama warga Negara, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak cepat memberikan penilaian dan pilihan.

Ketiga, Watak kritis dan rasional. Warga negara yang demokratis ditunjukkan melalui karakter mereka yang kritis terhadap realitas sosial yang berkembang di sekitar mereka. Habitus kritis harus berdasarkan pada karakter pertama yaitu bertanggungjawab terhadap isu yang dikritisinya.

Sikap dan struktur kognitif warga negara yang demokratis setiap keputusannya dilakukan secara bebas tetapi tetap rasional. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional lepas dari prasangka dan sikap emosional serta subjektif. Habitus rasional ini ditampilkan dalam semua ranah sosial yang dihadapinya.

Keempat, Adil dan jujur. Sikap warga negara yang demokratis adalah adil dan jujur. Setiap tindakan ketidakadilan dan ketidakjujuran merupakan penentangan dan pelanggaran hak asasi orang lain yang diperlakukan secara tidak adil.

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi di Malaysia. Seperti halnya di Indonesia, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Malaysia merupakan bagian dari strategi dan upaya pendidikan demokrasi. Pendidikan Sivik Upaya membentuk Identitas bersama, partisipasi warga negara, memajukan negara. Sejarah perkembangan Malaysia menunjukkan ada fondasi utama penyokong negara yaitu: Raja, Islam, dan negara. Konsepsi warga negara dalam konteks Malaysia adalah Melayu-Islam. Melayu dalam hal ini tidak mengacu kepada kelompok etnis tetapi bangsa. Warganegara dalam konsepnya adalah Melayu-Islam. Konsep Melayu di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Melayu di Malaysia boleh jadi berasal dari kelompok etnis yang bukan Melayu sama atau bahkan dari luar negara. Asalkan mereka oarang-orang yang disebutkan di atas menganut, memeluk Islam maka mereka ini disebut sebagai orang Melayu.

Pemerintahan Malaysia sejak awal mendorong dan memfasilitasi tiga etnis dominan di negara ini yaitu: Melayu, India, dan China membentuk dan membangun integrasi dengan corak nilai-

nilai dan identitas Melayu-Islam sebagai acuan utamanya. Sekaligus Melayu-Islam sebagai kelompok sosial yang berperan penting serta acuan utama menggerakkan dan membentuk identitas bersama kelompok sosial yang ada tersebut. Peran Melayu tidak hanya motor penggerak tetap kekuatan sosial di Malaysia yang mengendalikan kekuasaan. Posisi raja-raja di Malaysia sejak awal hingga sekarang ini menjadi

kekuatan utama. Habitus warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan dan dibentuk dalam rangka ketundukan serta ketaatan pertama kepada raja, kedua agama Islam dan ketiga negara. Secara etnisitas sesungguhnya Malaysia tersusun dari tiga etnis utama yaitu Melayu, China dan India. Dalam parlemen, ketiga kelompok sosial ini menjadi kelompok pengisinya dengan masing-masing partai politik berbasis ketiga kelompok sosial dominan tersebut.

Habitus Demokrasi dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Malaysia. Sejalan dengan pengaruh perkembangan globalisasi yang semakin pesat, kurikulum pendidikan sivik kewarganegaraan di Malaysia banyak mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, perubahan kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dipengaruhi oleh ketegangan dan perselisihan dalam masyarakat tertentu karena keberagaman budaya, sejarah, agama, dan tradisi. Berdasarkan latar belakang situasi demikian, arah dan tujuan dari pengembangan pendidikan sivik dan

kewarganegaraan di Malaysia diarahkan pada strategi membangun integrasi nasional bangsa Malaysia.

Dalam struktur sistem pendidikan nasionalnya, Pendidikan sivik dan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan Malaysia umumnya ada dalam kurikulum *Social Studies* oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk semua tingkatan yakni sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Pada awal perkembangannya tahun 1961, pembelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dilaksanakan selama 40 menit perminggu. Pendidikan sivik dan kewarganegaraan telah diintegrasikan ke dalam ilmu sosial, pendidikan moral, pendidikan islam, pendidikan sejarah, pendidikan nilai-nilai serta di bidang pelajaran yang terkait dengan bahasa melayu. Integrasi pendidikan kewarganegaraan ke dalam ilmu sosial dijelaskan lebih eksplisit. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum inti melampaui batas-batas nasional untuk menutupi daerah dan mencapai tujuan dalam kompetensi kewarganegaraan global.

Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia bahwa pada tahun 2000 memasukkan pendidikan moral sebagai bagian dari mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dasar. atau selama enam tahun terbagi menjadi lima bidang yaitu a) Nilai-nilai berkaitan dengan pengembangan diri; b) Nilai-nilai yang berkaitan dengan diri dan keluarga; c) Nilai-nilai yang berkaitan diri dan Masyarakat; d) Nilai-nilai yang berkaitan dengan diri dan

lingkungan dan e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan diri dan negara. Dari tahun pertama sekolah dasar, fokus dari kurikulum pendidikan moral adalah tanggung jawab individu dalam masyarakat multietnis melalui kegiatan seperti menyanyikan lagu-lagu yang bertema persatuan dan berbicara tentang etnis dari kelompok lain.

Sedangkan untuk sekolah menengah, seluruh bidang nilai moral didedikasikan dengan nilai-nilai terkait dengan perdamaian dan keharmonisan tetapi aspek multikulturalisme di realisasikan di seluruh kurikulum seperti toleransi dan moderasi yang ada pada nilai-nilai yang berkaitan dengan pengembangan diri. Selain itu, nilai-nilai yang berkaitan dengan negara atau kewarganegaraan berupa rasa hormat dan taat pada raja atau pemimpin atau negara; menghormati aturan dan hukum; cinta dan damai hidup harmonis. Untuk silabus pendidikan moral terfokus ke dalam empat komponen yaitu nilai-nilai, akademik, hasil belajar dan aktivitas belajar.

Sejak tahun 1970-an, kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Malaysia mulai dirumuskan dan dilaksanakan dalam silabus untuk pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Namun, pada tahun 1976 adanya revisi terhadap silabus pendidikan kewarganegaraan yang memiliki tema rukun negara. Yang tujuan Pendidikan kewarganegaraan ini adalah: (1) menumbuhkan sikap patriotisme; (2) menanamkan sikap toleransi terhadap ras dan kelompok-kelompok lain; (3) mengembangkan kemandirian; (4) mengembangkan sikap positif terhadap perubahan; dan (5) untuk menanamkan karakter yang baik. Dengan latar belakang perbedaan dan sejarah Malaysia yang telah dikemukakan, maka Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan:

Pertama, Mengembangkan identitas nasional, toleran dan saling menghormati antar berbagai kelompok etnis. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ditujukan kepada pembentukan habitus dan identitas bersama kelompok sosial warga negara di Malaysia untuk memajukan negara, kepatuhan kepada raja dan ketundukan kepada ajaran Islam. Arah pengembangan habitus yang demikian ini sebagaimana juga dikemukakan studi Hendra dan Hajri (2023:43;44) bahwa: latar belakang Malaysia sebagai negara dengan masyarakat majemuk sudah berlangsung sejak era kolonialisme Inggris. Ada tiga etnis utama yang mendiami Malaysia, yakni Melayu, China, dan India. Untuk mempersatukan berbagai etnis yang ada maka salah satu tujuan nasional adalah persatuan dengan semua kebijakan pendidikan terinternalisasi tujuan tersebut. Dengan latar belakang Malaysia sebagai negara yang pluralistik, pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Malaysia secara identitas merupakan negara yang majemuk dari segi etnik dan agama. Secara sosiokultural pluralisme kesukuan dan agama ini terutama menjadi anugerah dengan kekayaan kebudayaan yang berkembang, tetapi pada lain sisi kemajemukan tersebut berpotensi sebagai akar konflik sosial. Sebab fakta itu, proses pendidikan warganegara Malaysia dengan multikulturalnya diarahkan pada pembentukan dan perwujudan solidaritas nasional bagi terstrukturanya stabilitas dan keberlanjutan politik nasional pengintegrasian kelompok sosial yang ada secara berkelanjutan. Proses pembangunan bangsa dan identitas nasional melalui pendidikan pun ditujukan untuk membangun harmoni sosial untuk mewujudkan stabilitas demi pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Materi dan kajian Pendidikan Civik dan Kewarganegaraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi di Malaysia terpusat pada inti utama yaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia.

Kedua, Warganegara yang bertanggungjawab, mengerti hak taat pada hukum dan berfikir serta bersikap kritis. Tujuan dari Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan menumbuhkan sikap pribadi yang bertanggung jawab dan mengerti kewajiban dan hak-hak sebagai warganegara serta

ketaatan aturan hukum. Karakter dan habitus warganegara yang demokratis melalui pendidikan sivik di Malaysia diarahkan pada pengembangan kemampuan dan sikap berfikir kritis. Pengembangan pendidikan sivik dan pembangunan bangsa dilakukan dengan pembenahan kebijakan melalui keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang dianggap penting digunakan pada sistem pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002). Hal ini strategi menghindari potensi konflik berbasis etnis dan agama.

Ketiga, Demokratis dan Partisipatif. Dalam demokrasi modern pendidikan sivik dan kewarganegaraan sebagai program untuk belajar menjadi warga negara dalam demokrasi. Lembaga pendidikan memainkan peran dalam mengembangkan partisipasi politik dan

keterlibatan generasi muda memiliki kesempatan untuk belajar tentang demokrasi, sistem pemerintahan dan kewarganegaraan. Menghubungkan pendidikan kewarganegaraan dengan mahasiswa seperti pengetahuan kewarganegaraan dan partisipasi demokratis.

Dengan temuan pada konteks kedua negara, Indonesia dan Malaysia, Pendidikan Kewarganegaraan awalnya berkembang dari isu sebagai negara baru yang berdaulat, isu dan tujuan pendidikan bergerak di sekitar persoalan membentuk warga negara sebagai warga negara yang sadar hak dan tanggungjawab, integrasi sosial, nasionalisme dan kepentingan negara baru yang terbentuk. Belum berkembang isu-isu kompleks kenegaraan sebagaimana halnya negara maju. Isu Pendidikan Kewarganegaraan bergulir dan berkembang ke isu lebih kompleks seiring makin kompleksitasnya isu internal serta persoalan eksternal negara sebagai sebuah sistem dunia. Salah satu isu utamanya adalah demokratisasi. Konsep dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pun berkembang seiring dengan tuntutan isu demokratisasi di mana sub sistem pendidikan harus meresponsnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang isu penelitian sebagai berikut: Pertama, pada tataran praktis implementasi pendidikan kewarganegaraan tiap-tiap kedua negara berbeda-beda sesuai dinamika dan sejarah yang menyertainya. Dalam konteks dinamika kedua negara yang terus berkembang praktik pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada pembentukan identitas bersama sebagai warga negara dengan tujuan utama mengintegrasikan kelompok etnis dan suku bangsa, menumbuhkan nasionalisme bangsa dan cinta tanah air serta berperan aktif dalam proses pembangunan negara sebagai indikator utama warganegara yang bertanggungjawab.

Kedua, konsep Pendidikan dan Isu Kewarganegaraan yang terus Berkembang. Dari sisi konsep pendidikan kewarganegaraan kedua negara, Malaysia dan Indonesia, terus menerus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan konteks yang dihadapi baik itu konteks nasional maupun global. Pendidikan kewarganegaraan berkembang dengan kerangka pengembangan kompetensi kewarganegaraan dan global. Arah ini menunjukkan respons lembaga pendidikan terhadap persoalan dan isu kewarganegaraan yang terus berkembang dan kompleks. Sebagian di antara isu kontemporer tentang kewarganegaraan adalah HAM, dinamika politik dan demokrasi.

Ketiga, muatan pendidikan kewarganegaraan bermuara pada pembentukan pribadi warga negara sebagai *good citizenship*. Terkait isu demokrasi, pendidikan kewarganegaraan di Malaysia dan Indonesia dipakai dan berfungsi memberikan pemahaman tentang kehidupan bernegara, hak, dan kewajiban warga negara serta sebagai media pendidikan habitus demokrasi. Struktur habitus demokrasi yang dikembangkan adalah: Demokratis, menjunjung tinggi hukum, toleran, terbuka, dan plural. Berhubungan dengan habitus dan karakter demokratis, habitus demokrasi yang berkembang mengikuti ruang penguasaan negara yang ganti berganti.

Habitus demokrasi yang berkembang sekarang sebagai respons dan kebutuhan sebuah negara maju di mana demokrasi menjadi salah satu indikator kualitas penyelenggaraan dan budaya warga negaranya. Hasil studi ini bermanfaat untuk bahan kajian dan pengembangan konsep Pendidikan Kewarganegaraan pada kedua negara. Temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan studi berikutnya dengan isu kajian yang berbeda.

Pustaka Acuan

- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 2016. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Terjemahan Santoso, Yudi. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak.
- Domain pendidikan sivistik dan kewarganegaraan. <https://www.slideshare.net/slideshow/domain-pendidikan-sivistik-dan-kewarganegaraan/6991527#5>.
- Hendra, Hajri, Priazki. "Kajian Komparasi Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia". *FOUNDASIA*. Volume 14, No 1, 2023.
- Kalidjernih, Freddy K. 2010. *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kementerian Pelajaran Malaysia. 2000. *Kurikulum Bersepadu Sekolah*.
- Maftuh, B., dan Sapriya. 2005. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pemetaan Konsep*. *Jurnal Civicus* 1 (5), 319-321.
- Miles, M.B & Huberman, A.M, 1984. *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills, Calif, Sage.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- MALAYSIA. [https://www.moe.gov.my/pelaksanaan-pendidikan-sivik-oleh-kementerian pendidikan-malaysia](https://www.moe.gov.my/pelaksanaan-pendidikan-sivik-oleh-kementerian-pendidikan-malaysia).
- Riawanti, Selly. 2017. *Teori Tentang Praktik: Saduran Outline of Theory of Practice Karya Pierre Bourdieu*. Bandung: Ultimus.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Rosyada, Dede. et.al. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta.
- Shufiyati. Pendidikan kewarganegaraan di malaysia. <https://www.slideshare.net/Eftandre/pendidikan-kewarganegaraan-di-malaysia#1>.
- Sunarso. 2009. Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim. *Humanika* Vol. 9 No. 1, Maret 2009, hal. 67-80.
- Ubedillah; Rozak, Abduk; Hanas, Ade Sukron; dan Darmaji, Agus. 2009. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Widiatmaka, Pipit. "Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik". *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1 Juni 2022.
- Widiatmaka, Pipit. "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Karakter Warganegara yang Baik dan Mengantisipasi Krisis Karakter Pemuda". *PALLANGGA PRAJA* Volume 5, No. 1, April 2023.
- Winarno, Wijianto. 2010. *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn)*. Laboratorium PPKn UNS & UNS Press.
- Winataputra, U.S. 2014. *Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Konteks Kurikulum 2023*. Makalah pada Seminar Nasional PKn-AP3-KNI.